



Academic Journal of Da'wa and Communication

KETERPAPARAN HOAKS VAKSIN COVID-19 DALAM PROSES KOGNITIF WARGANET INDONESIA

**Handini¹,
Achmad Fadloli Mubarok²,
Muhammad Abdul Kholiq³**

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; ²CRCS Universitas Gajah Mada;

³Ketahanan Nasional UGM

Abstract

Keywords:

Hoaxes; Vaccines;
COVID-19;
Netizens

This article is concerned with the phenomenon of the COVID-19 vaccine hoax's exposure on netizens in Indonesia. A number of previous studies revealed that this phenomenon emerged directly as an impact of the infodemic in digital media. The increasing number of internet users and the weak state regulation in monitoring digital information traffic are considered to have created an environment that fosters hoax content. This circumstance brings netizens to a vulnerable situation to the COVID-19 vaccine hoax's exposure. However, in contrast to this conclusion, this study found that the issue of digital literacy of netizens had the most significant role in the phenomenon of exposure to COVID-19 vaccine hoaxes. In this case, the user's susceptibility to a hoax should be seen as a personal decision generated by his internal cognitive process. Conceptually, a user who believes in a hoax has gone through the process of making consideration and decided to choose an attitude that is most satisfying for him. Using the bounded rationality theory, this study explains how the exposure of netizens to Covid-19 vaccine hoax information is related to their decision to access that information in digital media. Limitations to optimizing rational attitudes when responding to hoax information and its calamitous impact cause netizens to tend to accept information without in-depth clarification. This behavior encourages netizens to seek and affirm further information that tends to reinforce previously believed narratives.

Abstrak

Kata kunci:

*Hoaks; Vaksin,
COVID-19;
Warganet*

Artikel ini membahas fenomena keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 pada warganet di Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa fenomena tersebut muncul sebagai akibat langsung dari derasnya arus informasi hoaks di media digital. Meningkatnya jumlah pengguna internet serta lemahnya pengaturan negara dalam mengawasi lalu lintas informasi digital dianggap telah menciptakan lingkungan yang menyuburkan konten hoaks. Kondisi ini menempatkan warganet pada situasi yang rentan terpapar hoaks vaksin COVID-19. Namun, berbeda dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa tingkat literasi digital warganet memiliki peran yang paling signifikan dalam fenomena keterpaparan hoaks vaksin COVID-19. Dalam hal ini, penerimaan informasi oleh pengguna media digital (user) perlu dilihat sebagai proses pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh lingkungan-internal kognitif dirinya. Secara konseptual, seorang user yang mempercayai sebuah hoaks telah melewati proses membuat pertimbangan dan sampai pada tahap memutuskan satu pilihan sikap yang paling memuaskan bagi dirinya. Dengan menggunakan teori rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), penelitian ini menjelaskan bagaimana keterpaparan informasi hoaks vaksin Covid-19 pada warganet berkaitan dengan keputusan mereka untuk mengakses informasi tersebut di media digital. Keterbatasan untuk mengoptimalkan sikap rasional ketika menanggapi informasi hoaks dan dampak negatifnya menyebabkan warganet cenderung menerima suatu info tanpa melakukan klarifikasi yang mendalam. Perilaku ini mendorongnya untuk mencari dan menerima informasi pendukung lain yang cenderung menguatkan narasi yang sudah dipercaya sebelumnya.

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pasca pengumuman tersebut, pemerintah Indonesia lewat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terus melakukan upaya untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut di Indonesia. Namun, grafik yang dirilis oleh situs resmi covid19.go.id secara berkala menunjukkan angka kasus aktif COVID-19 terus meningkat tajam hingga beberapa bulan berikutnya, dan baru mengalami penurunan untuk beberapa waktu

saja pada Oktober 2020. Sehingga, pada tanggal 3 September 2020 Presiden RI membentuk tim pengembangan vaksin COVID-19 lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2020. Satu bulan kemudian, pada tanggal 6 Oktober Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi penanggulangan COVID-19.

Kebijakan pemerintah tersebut diikuti dengan maraknya informasi tentang vaksin COVID-19 yang tersebar luas di media digital. Namun, banyak di antara informasi tersebut terindikasi sebagai hoaks. Informasi hoaks mengenai vaksin COVID-19 ini menjadi fenomena yang masif dan memicu sejumlah sikap yang kontra-produktif terhadap penanganan wabah. Dikutip dari Kompas (18/2/2021), dilaporkan bahwa sejumlah warga di dusun II Batu Putih, desa Alila Timur, kecamatan Kabola, kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, bersembunyi ke hutan karena takut divaksin (S. M. Bere, 2021). Sejumlah tokoh agama seperti ustad Zulkifli M. Ali bahkan secara terang-terangan menghimbau agar masyarakat tidak bersedia divaksin. Sebelumnya, pada masa awal menyebarnya wabah COVID-19, masyarakat juga dilanda informasi hoaks, terutama sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi bahwa virus tersebut sudah masuk ke Indonesia. Banyak di antara masyarakat yang percaya virus COVID-19 adalah isu propaganda konspirasi asing (Hasyim, 2020). Akibatnya, banyak warga yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dan melanggar aturan pembatasan sosial untuk mencegah penularan yang meluas.

Dikutip dari Tribunnews (F Alamsyah, 2021), juru bicara program vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, dari sebanyak 2.500 informasi hoaks mengenai pandemi COVID-19 yang sudah diidentifikasi oleh Kominfo per April 2021, 850 diantaranya berupa narasi tentang vaksin. Sementara itu, per 24 Mei 2021, Kominfo sudah mencatat dan menangani sebanyak 1.508 konten hoaks vaksin COVID-19 (Nuralam, 2021). Data ini memperlihatkan

derasnya arus informasi hoaks mengenai vaksin COVID-19 di tengah masyarakat, sekaligus tingkat risiko keterpaparan warganet yang juga tinggi.

Berkaca dari kasus hoaks virus COVID-19, situasi ini juga layak mendapatkan perhatian serius berkenaan dengan upaya penanggulangan pandemi lewat program vaksinasi. Dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI yang dirilis pada November 2020, sebanyak 27% dari total responden menyatakan ragu dan delapan persen menolak rencana Pemerintah untuk mendistribusikan vaksin Covid-19. Sebagai representasi suara nasional, jumlah ini cukup mengkhawatirkan dan akan sangat mempengaruhi keberhasilan program vaksinasi nasional.

Berkenaan dengan isu tersebut, keterpaparan hoaks selama ini cenderung dilihat sebagai akibat langsung dari derasnya arus informasi hoaks di media digital serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap arus informasi digital di Indonesia (Bafadhhal & Santoso, 2020; Hadi, M.D.S., Widodo, P. & Putro, n.d.; Pramono, 2020). Kesimpulan ini merujuk pada data yang menampilkan informasi hoaks sebagai trenyang baru berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna jaringan internet dan akses ke media digital-online. Pendekatan yang cenderung menyoroti peranan dominan platform-media digital dan instrumen legal formal dalam sebuah tren informasi hoaks ini memiliki kelebihan yaitu mampu memberikan gambaran peta digital sebuah informasi, termasuk karakter narasi dan pola distribusinya. Tetapi, pendekatan ini tidak cukup memadai untuk menjelaskan peranan *user* yang signifikan dalam distribusi informasi tersebut. Padahal, setiap informasi yang beredar di media digital selalu berorientasi pada keterjangkauannya oleh *user*, dan oleh karenanya peran dan keputusan user menjadi sangat signifikan.

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut, tulisan ini ingin meneliti bagaimana warganet menjadi rentan terpapar informasi hoaks vaksin COVID-19 dari sudut pandang dirinya sebagai subyek di

media digital. Pendekatan ini penting untuk menyempurnakan kajian terdahulu yang cenderung menyoroti peran media secara dominan, sehingga menempatkan warganet atau *user* hanya sebagai obyek yang tidak memiliki otoritas penuh dalam penyebaran suatu informasi. Penelitian ini membahas fenomena keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 pada warganet dari sudut pandang psikologi kognitif. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana trend produksi informasi hoaks memiliki keterhubungan yang relevan dengan perilaku digital warganet sebagaimana yang terekam di platform-platform digital.

Sejak fenomena hoaks beredar di media digital, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk melihat fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang beragam menghasilkan penekanan kesimpulan yang berbeda pula dalam topik ini, mulai dari faktor penyebab, modus narasi, hingga motif dari informasi hoaks. Dalam kasus hoaks mengenai pandemi COVID-19, termasuk di antaranya tentang vaksin, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan topik literasi digital dengan penekanan yang dominan pada aspek konten-narasi dan perkembangan media.

Beberapa penelitian yang fokus pada konten narasi hoaks menitikberatkan pembahasannya pada identifikasi hoaks dari segi redaksi dan substansi. Mereka diantaranya mengidentifikasi narasi dan membuat kategorisasi hoaks vaksin COVID-19 menjadi tiga kelompok: hoaks tentang komposisi vaksin COVID-19, hoaks tentang efek samping dari vaksin COVID-19, dan hoaks tentang adanya sejumlah lembaga profesi dan figure pejabat yang menolak vaksin COVID-19 (Rahayu, K.Y., 2021). Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa narasi semacam itu telah menimbulkan sikap resisten pada masyarakat terhadap program vaksinasi. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Oemar Madri Bafadhal dan Anang Dwi Santoso (Bafadhal & Santoso, 2020). Mereka mengelompokkan disinformasi pandemi COVID-19 menjadi lima kategori dilihat dari motif dan dampak yang mungkin

ditimbulkan olehnya, yaitu: disinformasi politik, kesehatan, situasi luar negeri, bisnis, dan kriminalitas. Mereka menyatakan bahwa muara dari seluruh narasi itu berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan apatisme terhadap otoritas pemerintah dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan ini diambil dari anjuran-anjuran yang dinyatakan secara implisit dalam narasi hoaks, di mana di situ tampak tujuan yang konsisten untuk menimbulkan *public distrust* terhadap otoritas-otoritas yang berurusan langsung dengan COVID-19 dengan motif politik pragmatis (Bafadhhal & Santoso, 2020). Kategori-kategori yang ditampilkan dalam sejumlah literatur itu sebenarnya juga bisa dilihat sebagai cerminan dari dinamika isu yang berkembang di masyarakat, termasuk diantaranya menceritakan konteks penanganan situasi pandemi yang buruk. Pembacaan struktural semacam ini dapat dilihat pada (Hasyim, 2020) dalam *COVID-19, Islamic Civil Society and State Capacity in Indonesia*.

Kajian yang lain dalam isu ini memberikan penekanan pada sejumlah faktor yang ditengarai menjadi penyebab munculnya *trend* hoaks. Dari kajian yang ada, mayoritas sepakat bahwa penyebab utamanya adalah karena melonjaknya pengguna internet, derasnya arus informasi yang salah, serta absennya negara dalam menyediakan informasi yang tepat dan cepat (Bafadhhal & Santoso, 2020; Hadi, M.D.S., Widodo, P. & Putro, n.d.; Juneja, P., & Mitra, 2021; Pramono, 2020). Melonjaknya jumlah pengguna internet di tengah situasi pandemi turut menyuburkan kejahatan siber. Sehingga, menurut (Pramono, 2020), pendidikan keamanan siber menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk mengamankan diri mereka dari serangan siber. Lebih lanjut ia juga menerangkan sejumlah motif dari kejahatan siber, termasuk fenomena hoaks ini, dari yang sifatnya ideologis hingga politik pragmatis.

Hal ini juga ditegaskan oleh Pramono (2020) dalam penelitiannya, bahwa pesatnya perkembangan internet dan media sosial menciptakan iklim yang subur bagi tersebarnya berita bohong. Untuk itu, penguatan

media dalam menyediakan informasi yang akurat menjadi sangat penting. Meskipun, pembekalan kepada masyarakat juga penting. Hanya saja dalam temuannya Pramono (2020) mengatakan bahwa hoaks di masa pandemi mayoritas masuk kategori yang diproduksi tanpa sengaja, sehingga solusi yang disarankan adalah dengan menguatkan media informasi serta memberikan pembekalan kemampuan bagi masyarakat dalam mengakses teknologi. Bukan penindakan tegas dari pihak yang berwenang. Kesimpulan ini bertentangan dengan temuan banyak penelitian lain yang dengan jelas menyebutkan adanya motif sengaja dalam produksi informasi hoaks di masa pandemi COVID-19.

Disinformasi dibagikan, dikonsumsi, dan mempengaruhi perilaku masyarakat secara massif adalah disebabkan karena absennya negara dalam menyediakan informasi yang kredibel secara cepat dan tepat (Bafadhal & Santoso, 2020). Lambatnya penanganan terhadap disinformasi memicu ketidakpercayaan publik terhadap otoritas pemerintahan yang pada akhirnya melahirkan tindakan kontraproduktif terhadap penanganan pandemi. Dalam kasus ini, mereka mendorong kehadiran negara secara tegas dalam memberikan informasi dan klarifikasi sebagai solusinya. Disinformasi umumnya berangkat dari motivasi finansial dan ideologis yang harus diberantas dengan tindakan yang tegas.

Berbeda dengan kajian yang fokus melakukan kategorisasi hoaks berdasarkan konten narasi, ada juga model kajian yang melakukan kategorisasi dan pemetaan hoaks seputar pandemi COVID-19 berdasarkan *platform* yang dipakai sebagai media penyebarannya. Senja Yustitia dan Panji Dwi Ashrianto dalam penelitiannya fokus melakukan pemetaan misinformasi dan disinformasi tentang COVID-19. Mereka menemukan bahwa intensitas hoaks, misinformasi dan disinformasi vaksin COVID-19 di Indonesia paling tinggi terjadi pada bulan Maret, lalu April dan Mei. Dari segi *platform*, hoaks paling banyak disebarakan melalui Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp. Dari segi narasi, konten yang paling banyak disebarakan berupa konten

yang menyesatkan, konten palsu, lalu konten yang salah. Sementara sepanjang Januari-Juli 2020, sumber misinformasi COVID-19 paling banyak bersumber dari opini personal. Data ini menjelaskan bahwa opini masyarakat tidak pernah murni keluar dari pendapat pribadi secara terpisah, tetapi mengikuti trend yang berkembang di lingkungannya. Kemudian, masyarakat juga cenderung mempercayai berita hoaks dikarenakan karakteristiknya yang dimodifikasi dari sumber-sumber kredibel yang dimodifikasi ataupun dari opini personal yang dianggap terpercaya.

Model pendekatan kuantitatif dalam isu ini juga dipakai oleh Karandeep Singh, dkk dalam penelitiannya mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hoaks dan penerimaannya. Ia menemukan bahwa hanya 50% pengguna online yang kemungkinan benar-benar mengakses informasi yang sudah terkonfirmasi kebenarannya (Singh et al., 2021). Dari aspek demografi, negara dengan tingkat ekonomi yang rendah masyarakatnya lebih rentan percaya pada misinformasi seputar pandemi. Tetapi, dalam kasus misinformasi vaksin, tidak ada perbedaan yang signifikan antara negara berkembang dengan negara terbelakang. Satu pernyataan yang ia garis bawahi, bahwa narasi hoaks memiliki karakteristik lokal yang cenderung familiar bagi masyarakat, dan hal ini dianggap cukup efektif untuk membuat masyarakat percaya. Kesimpulan ini senada dengan Jon Roozenbeek, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan kemampuan ekonomi juga mempengaruhi kerentanan individu dan masyarakat terhadap paparan misinformasi COVID-19.

Selebihnya, di luar model pendekatan yang menghasilkan kategorisasi sebagaimana yang sudah di bahas di atas, beberapa peneliti berusaha melakukan analisis yang lebih mendalam pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh hoaks serta usaha dan strategi yang dipakai oleh sejumlah pihak untuk melakukan kontra-narasi hoaks vaksin COVID-19. Kajian yang dilakukan Montagni dkk.

(2021) misalnya, menjelaskan bagaimana kesediaan menerima vaksin COVID-19 berhubungan erat dengan literasi kesehatan dan kemampuan mendeteksi berita palsu. Bahkan, berita palsu merupakan penyebab utama yang menyebabkan masyarakat enggan hingga menolak menerima vaksin. Sebagai respon atas sikap kontraproduktif semacam itu, (Susilo, D., Putranto, T.D., & Navarro, 2021) memfokuskan penelitiannya pada strategi yang digunakan pemerintah untuk memerangi hoaks seputar vaksin dengan cara menghadirkan pendapat dari para pakar epidemiologi.

Selain itu, secara umum terdapat riset-riset beragam tema yang berkaitan dengan pandemi (Ansoriyah, Warella, Purnaweni, & Hastuti, 2020; Bistara, 2020; Hannan, Azizah, & Atiya, 2020; Zuhri, 2020). Riset-riset tersebut menunjukkan bahwa pandemi telah memantik sejumlah penelitian multiperspektif. Pandemi yang mengubah banyak hal dalam hidup manusia dan menghadirkan sejumlah penyesuaian nyatanya memang menarik dicermati, tak terkecuali dari sudut pandang komunikasi dan informasi. Riset dari sudut pandang komunikasi dan informasi salah satunya menyoal hoaks. Jika ditarik ke belakang, terdapat banyak riset yang mendedah persoalan hoaks (Ali, 2017; Bakri, Zulhazmi, & Laksono, 2019; Heryanto, 2017; Juditha, 2018; Maqruf, 2021; Tsaniyah & Juliana, 2019).

Dari sejumlah penelitian yang sudah disebutkan di atas, hampir tidak ada yang menjelaskan fenomena keterpaparan hoaks dari sudut pandang yang lebih personal; kenapa dan bagaimana seseorang menerima dan mempercayai informasi hoaks. Penjelasan yang lebih dominan menyoroti arus informasi dan keteraksesan media digital sebagai faktor dari masifnya hoaks pada dasarnya tidak menjawab pertanyaan mengenai keterpaparan hoaks sebagai fenomena sosial, melainkan sedang menjelaskan dilemma perkembangan dunia digital. Kecuali sejumlah penelitian yang membahas respon masyarakat terhadap informasi hoaks seperti yang dilakukan oleh Ahmad Khoironi Arianto (2021) dan Endang Fatmawati (2020). Pada keduanya,

selain faktor media digital, rendahnya kesadaran masyarakat tentang tindakan membagikan hoaks menjadi poin yang tidak bisa diabaikan.

Secara spesifik Arianto (2020) menyebutkan jika masyarakat tidak banyak yang menyadari konsekuensi pidana yang bisa ditimbulkan dari mempercayai dan membagikan informasi hoaks. Sementara, bagi Fatmawati (2020) hal yang paling bisa mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap hoaks adalah meningkatnya akses dan aktivitas sosial media yang tidak dibarengi dengan kompetensi literasi yang memadai. Meskipun demikian, kesimpulan ini belum menjelaskan fenomena keterpaparan informasi hoaks yang terjadi pada warganet secara personal. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat fenomena keterpaparan hoaks sebagai gejala kognitif sosial lewat pendekatan kualitatif, di mana persoalan ini tidak bisa dijawab melalui analisis statistika digital yang cenderung kuantitatif.

METODE PENELITIAN

Penelusuran data awal pada penelitian ini memanfaatkan hasil identifikasi informasi hoaks tentang vaksin COVID-19 yang ditampilkan pada laman *Hoax Buster* di situs covid19.go.id. Dari data yang dikumpulkan pada laman tersebut dapat diketahui informasi hoaks tentang vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat disertai dengan berita klarifikasi yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Dengan merujuk pada definisi hoaks yang telah dikompilasi oleh Janner Simarmata dalam bukunya *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing*, penelitian ini mendefinisikan hoaks sebagai informasi atau berita palsu yang di dalamnya mencakup semua kategori informasi seperti berita bohong (*fake news*), tautan jebakan (*click bait*), bias konfirmasi, misinformasi, disinformasi, dan propaganda (Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, 2019). Dari data yang diperoleh di laman *Hoax Buster* itu kemudian penelitian ini melakukan penelusuran lebih lanjut di internet untuk melengkapi data yang diperlukan berupa berita atau video yang menampilkan

tanggapan atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu informasi hoaks di masyarakat.

Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan analisis diskursus untuk melihat proses yang terjadi ketika seseorang atau masyarakat menerima atau menolak hoaks sebagai bentuk praktik sosial. Merujuk pada gagasan Peter L. Berger mengenai teori konstruksi sosial, pengetahuan seseorang tentang realitas hidup dan makna yang diberikan atasnya adalah hasil dari interaksi yang rutin dan permanen di masa sebelumnya (Berger, P. & Luckman, 1966). Secara operasional, penelitian ini memakai kerangka rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) oleh Herbert A. Simon untuk melihat proses tersebut dari sudut pandang personal kognitif. Kerangka ini akan menjelaskan keterpaparan hoaks tidak saja sebagai akibat dari masifnya arus informasi, tetapi juga menyoroti kapasitas individu yang mengaksesnya untuk melakukan klarifikasi.

Kerangka teori rasionalitas terbatas ini berangkat dari gagasan bahwa sebuah pilihan atau keputusan yang dibuat oleh seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh konsistensi tujuannya dalam suatu tindakan maupun faktor lingkungan eksternal yang melingkupi dirinya, tetapi juga ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki olehnya dan kemampuan menggunakannya secara relevan pada saat menimbang-nimbang konsekuensi yang akan ditimbulkan, kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, serta alternatif yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian situasi dalam pilihan-pilihan yang diambilnya (H.A Simon, 2000). Dari situ, maka hasil sebuah keputusan tidak bisa diprediksi tanpa pengetahuan tentang prosesnya. Oleh karena itu, mempertanyakan kenapa dan bagaimana seseorang terpapar hoaks menjadi penting. Asumsi penting yang menjadi karakteristik dari teori ini menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan selalu dibatasi oleh kemampuan kognitif seperti kebiasaan, nilai-nilai, pengetahuan, preferensi, serta batasan dari aspek lingkungan eksternal, sehingga keputusan yang

dipilih sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa disebut rasional. Oleh karena itu, penelitian ini secara deskriptif analitis berusaha menjelaskan keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 pada seseorang sebagai hasil dari proses kognitif semacam ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Hoaks Vaksin COVID-19 dalam Konteks Sosial Warganet

Ada ratusan informasi hoaks mengenai vaksin COVID-19 bertebaran di media digital dan menjadi konsumsi warganet. Sejumlah penelitian menemukan bahwa media sosial secara konsisten dijadikan sebagai platform yang paling sering untuk menyebarkan hoaks tersebut dibanding media lain (Pramono, 2020). Dengan bantuan laman *Hoax Buster* dalam situs covid19.go.id, dapat dilihat bahwa sejak pemerintah mengumumkan rencana vaksinasi pada Oktober 2020, hoaks yang terkait dengan hal ini terus berkembang dengan narasi yang semakin bervariasi. Sementara, berdasarkan laporan yang ada, terbukti bahwa tingkat keterpengaruhan oleh hoaks ini cukup berdampak pada kesediaan seseorang untuk menerima vaksinasi (Lewandowsky, S., 2021). Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi penting.

Setelah mencermati ragam narasi hoaks vaksin COVID-19, secara garis besar isinya mengerucut pada tiga isu yang sudah menjadi diskursus di tengah masyarakat sejak lama, yaitu (1) isu identitas, (2) sains dan medis, dan (3) isu politik-ekonomi. Berkaitan dengan isu identitas, sentimen agama dan rasisme dalam bentuk rasa keterancaman akan musuh Islam dan sentimen anti Cina masih menjadi topik yang marak. Sementara topik sains dan medis banyak diwarnai oleh narasi *pseudo-sains*, di mana warganet tampaknya masih menaruh minat yang besar pada penjelasan yang cenderung fantastis dan non-mainstream. Terakhir, isu politik-ekonomi banyak diwarnai oleh narasi anti asing yang dipenuhi dengan kecurigaan pada agenda konspirasi global.

Dalam konteks nasional, sentimen SARA demikian marak karena menguatnya polarisasi masyarakat sebagai akibat politisasi identitas. Masing-masing kelompok menuding lawan politiknya sebagai pihak yang tidak pro Islam maupun pribumi. Ini terjadi terutama pasca momentum Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017 yang menyedot perhatian nasional. Jika dicermati, pada dasarnya isu-isu itu sudah mewarnai dinamika masyarakat Indonesia sejak lama. Tentu ada kondisi khusus yang membuat sejumlah isu di atas mengalami eskalasi pada waktu-waktu tertentu. Terlepas dari faktor kesengajaan, situasi pandemi COVID-19 ini sepertinya turut berperan menjadi *enabling environment* bagi maraknya isu-isu tersebut.

Berkaitan dengan hoaks yang bermuatan sentimen agama, hal ini tampak misalnya pada informasi yang menerangkan bahwa rakyat Aceh menolak vaksin COVID-19 karena mengikuti arahan ulama Aceh (covid19.go.id, 2021). Informasi yang diposting oleh akun Facebook bernama Sandiwara Akhe Jameun itu mengatakan bahwa ulama Aceh mewanti-wanti adanya kandungan yang haram dan berbahaya dalam vaksin. Ia menyertakan lampiran berita yang seolah bersumber dari situs acehsatu.com. Akun tersebut mengatakan agak pemerintah RI tidak memaksakan vaksin yang haram tersebut kepada warga Aceh karena melanggar syari'at Islam. Bahkan, jika pemerintah tetap memaksakannya, maka warga siap menyatakan untuk melawan dengan perang.

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan perang dalam pernyataan tersebut. Tetapi, narasi yang keras ini mencerminkan watak keagamaan yang konservatif dan mengancam integrasi bangsa. Untuk mencari tahu motif dan modus narasi hoaks tersebut, konteks sosial-keagamaan masyarakat Aceh, tempat di mana akun tersebut mengidentifikasi diri dan target pembacanya, menjadi pertimbangan yang tidak bisa dipisahkan. Secara politik, Aceh memiliki sejarah konflik berdarah antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun masalah ini sudah dianggap selesai pasca

terjadinya Kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005, tetapi trauma masa lalu dan tuntutan untuk memiliki kedaulatan sendiri sebenarnya masih tumbuh di kalangan masyarakat Aceh hingga saat ini. Tetapi, tingkat eskalasinya sudah tidak seperti pada masa lalu.

Tampaknya, psikologi masyarakat semacam inilah yang dijadikan sebagai pemicu dalam hoaks vaksin COVID-19 di atas. Apalagi, konflik Aceh ini juga terkait dengan isu agama karena masyarakat Aceh mengidentifikasi wilayahnya sebagai daerah Islam dan menuntut pemberlakuan syari'at sebagai sistem hukum yang diatur secara formal. Faktanya, persoalan itu juga tidak selesai meskipun Pemerintah RI sudah mengeluarkan kebijakan otonomi khusus yang mengakomodasi undang-undang syari'at atau *Qanun* di wilayah provinsi Aceh. Maka, bisa dipahami jika sewaktu-waktu isu konflik-perang dan agama dimunculkan lagi ke publik untuk tujuan tertentu. Terlepas dari dampak yang mungkin ditimbulkannya, dua isu tersebut terbukti relevan bagi warganet yang memiliki keterikatan dengan Aceh baik sebagai identitas daerah maupun agama. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa akun 'Sandiwara Akhe Jameun' sepenuhnya memahami situasi tersebut dan menjadikannya sebagai pemicu agar warga Aceh menolak vaksin COVID-19.

Modus hoaks sejenis lainnya yaitu dengan memanfaatkan otoritas agama untuk menjangkau warganet yang memiliki ikatan pada kelompok atau figur tertentu. Narasi ini misalnya digunakan dengan mencatut dua tokoh penceramah agama yaitu Syekh Ali Jaber dan Sony Eranata alias Ustad Maaheer at Thuwailibi. Keduanya dikenal sebagai penceramah dengan jumlah pengikut yang banyak tersebar di berbagai daerah. Syekh Ali Jaber bahkan sering tampil di televisi nasional. Dalam sejumlah informasi hoaks yang memuat nama keduanya, dikesankan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan kematian pada kedua tokoh tersebut. Hal ini tentu mempengaruhi persepsi para pengikutnya dalam merespon program vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah menjadi cenderung skeptis.

Di dalam sebuah gambar tangkapan layar (*screenshot*) yang diunggah di laman Facebook pada 9 Februari 2021 misalnya, terdapat foto Ustad Maaher yang disertai dengan narasi sebagai berikut:

“Sejak di tangkap oleh pihak kepolisian dengan tuduhan pasal penghinaan, lalu di tahan tanpa proses sidang terlebih dahulu. Dan seminggu dalam tahanan Ustadz Maheer at-Thuwailibi mengalami sakit. Namun pihak Kepolisian bersikeras tidak memberi kesempatan untuk berobat di luar. Lalu sekitar jam 19.00 Wib malam Ustadz Maheer meninggal dunia. ada kecurigaan pihak pengacara keluarga, kematian Ustadz Maheer karena Suntik Vaksin yang di paksakan, karena di tangan kiri terdapat lobang sobek akibat jarum Suntik akibat berontak. Rencananya pihak keluarga melalui pengacaranya akan melakukan Autopsi & Visum. Sedangkan pihak Kepolisian sampai hari ini belum memberikan penjelasan tentang kematian Ustadz Maheer ini” (Ridlo, 2019).

Informasi ini dibuat seolah berasal dari situs CNN Indonesia untuk meyakinkan warganet yang membacanya. Dari isinya tampak ingin menegaskan tentang tindakan kesewenang-wenangan yang terjadi pada Ustad Maaher oleh pihak kepolisian. Puncaknya adalah penyuntikan vaksin paksa yang menyebabkan Ustad Maaher meninggal dunia.

Narasi ini sangat relevan jika dikaitkan dengan dinamika politik-keagamaan yang mewarnai media digital Indonesia pasca Pilgub DKI Jakarta 2017. Pada momentum politik tersebut, nama Ustad Maaher menjadi viral karena sejumlah pernyataannya yang cukup keras terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan simpatisannya. Dalam sejumlah ceramahnya yang ditayangkan di YouTube, Ustad Maaher kerap menggunakan tudingan penistaan agama untuk menyebut kasus Ahok yang mengutip ayat al-Qur'an dalam kegiatan kampanye di Pulau Pari, juga para simpatisan Ahok yang dikenal dengan sebutan “Cebong” yang dianggap sering mempermainkan ajaran agama Islam. Ustad Maaher mendapat cukup banyak simpati dari

masyarakat muslim yang pada umumnya memiliki pemahaman yang sama bahwa seorang non-muslim tidak boleh menjadi pemimpin di negeri ini. Apalagi, narasi ini terbukti mampu mengkonsolidasi 'massa Islam' lewat Aksi Bela Islam yang dilakukan berjilid-jilid sejak 2016. Atas dasar ketokohan Ustad Maaher di kalangan simpatisan inilah, 'vaksinasi paksa' justru semakin menguatkan keyakinan mereka tentang tindakan rezim pemerintah yang mengkriminalisasi ulama dan memusuhi Islam.

Perlu diketahui bahwa efek politik identitas pasca Pilgub DKI Jakarta 2017 masih terasa hingga Pilpres 2019 karena sejumlah elit politik yang terlibat masih sama. Akibatnya, tercipta polarisasi yang menguat antara kelompok yang identik dengan Islam di satu sisi dan nasionalis di sisi lain (Mietzner & Muhtadi, 2018). Oleh karena itu, patut diduga pula bahwa hoaks kematian Syekh Ali Jaber memang ditujukan untuk memicu sikap resisten dari para simpatisannya yang mayoritas adalah kelompok Islam yang kecewa kepada rezim pemerintah pusat yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Polarisasi ini demikian kentara baik di ruang nyata maupun maya. Upaya mendiskreditkan program vaksinasi COVID-19 juga tidak lepas dari dinamika sosial masyarakat ini, di mana masyarakat selalu menaruh kecurigaan kepada pihak-pihak yang dianggap bersebarangan.

Selain sentimen keagamaan, isu identitas yang dipakai dalam hoaks vaksin COVID-19 adalah sentimen anti-Cina. Jika ditarik ke belakang, masyarakat di Indonesia memang memiliki catatan panjang tentang kekerasan berbasis SARA terutama pada sekitar tahun 1998 ketika terjadi kerusuhan massa di beberapa daerah. Sentimen ini juga muncul pada awal mula COVID-19 dikabarkan muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Dalam kasus vaksin COVID-19, narasi yang dibangun adalah bahwa Cina memiliki agenda jahat lewat vaksin yang diproduksi oleh mereka, sebagaimana virus COVID-19 yang juga dibuat di laboratorium di Cina.

Sebagai contoh yaitu sebuah gambar tangkapan layar dari video dengan *watermark* CNN Indonesia yang diberi tagline “*hati2,,, rakyat akan dibunuh vaksin Cina,,,!*” (CNN Indonesia, 2021). Informasi ini dibagikan di sebuah group WhatsApp. Faktanya, konteks video yang menerangkan tentang respon imun ADE (antibody-dependent enhancement) tersebut tidak memiliki korelasi dengan virus Corona maupun vaksin COVID-19. Narasi keliru untuk membingkai isu vaksin ini jelas mengarahkan warganet untuk menaruh kebencian kepada pihak Cina, di mana Indonesia menjadi negara yang paling banyak melakukan impor terhadap produk vaksinnnya (republika.co.id, 2020). Dalam hoaks lain yang diposting oleh akun facebook bernama Alexander Abu Taqi Mayestino malah dikatakan bahwa China sengaja melakukan uji coba vaksin kepada warga Indonesia karena laboratorium di sana kehabisan monyet (covid.go.id, 2020). Narasi yang bersifat menghasut ini mengarahkan warganet untuk memusuhi Cina dan Pemerintah RI yang dianggap melakukan persekongkolan jahat terhadap rakyat Indonesia tersebut. Bahkan, akun facebook bernama ‘Hemayani’ pada 5 Oktober 2020 mengunggah tangkapan layar yang mengatakan “*LBP mo Vaksinasi 100jt rakyat Pribumi RI dg COVID China. MUI sdh larang Vaksin tsb, maka umat Islam Haram ikut2an vaksin. GUE NO*” (Nuralam, 2021). Semakin jelas di sini tentang pihak-pihak yang sedang didiskreditkan pada program vaksin di Indonesia.

Modus lain yang digunakan untuk mendiskreditkan program vaksinasi ini adalah dengan mengatakan bahwa WHO menyebut vaksin Sinovac sebagai vaksin yang paling lemah, Sinovac adalah vaksin ilegal dan tidak bersertifikat WHO (S. M. Bere, 2021) hingga yang mengatakan suntikan Sinovac sebagai tindakan “kelinci percobaan”. Modus hoaks ini demikian marak apalagi publik menilai jika kebijakan impor vaksin Sinovac oleh pemerintah RI dianggap sebagai tindakan yang politis karena kedekatan hubungan diplomatik dengan Cina, dan terburu-buru karena belum lolos uji klinis tahap tiga (kompas.com, 2021). Akibatnya, persepsi yang ditimbulkan di tengah masyarakat menjadi cenderung ragu-ragu dan antipasti.

Di samping isu SARA, hoaks vaksin COVID-19 yang juga beredar luas di media digital adalah yang memuat penjelasan ilmiah-kesehatan yang keliru, atau *pseudo-sains*. Dari puluhan hoaks yang masuk dalam kategori ini, hampir semuanya menyebutkan tentang efek samping yang merugikan dari vaksin COVID-19. Sebagian hasil penelusuran lewat laman *hoax buster* dalam situs covid.go.id misalnya, menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 memiliki efek samping pembesaran alat kelamin (covid19.go.id, 2021) impotensi dan disfungsi ereksi, hingga turunnya imunitas drastis pada perempuan yang dalam masa menstruasi (Nuralam, 2021). Modus hoaks lainnya menjelaskan kandungan yang terdapat dalam vaksin secara tidak lengkap ataupun keliru. Misalnya, informasi hoaks yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac berisi virus hidup dan sel Vero yang berbahaya seperti boraks, formaline, aluminium dan merkuri, atau mengatakan bahwa vaksin Corona sebenarnya adalah molekul mRNA yang dipakai untuk memicu reaksi imun lewat pembentukan jaringan protein (Nuralam, 2021).

Karena vaksin merupakan virus yang dilemahkan, maka ia masih hidup dan bisa bermutasi bahkan berlipat ganda menjadi ribuan jumlahnya di dalam tubuh. Akibatnya justru akan menurunkan imunitas. Kondisi ini membuat seseorang mudah terinfeksi virus COVID-19 dan membuat kasus HIV tercatat meningkat pasca dilakukan vaksinasi. Sementara itu, dalam sebuah unggahan di Instagram dikatakan jika kenaikan kadar limfosit dalam tubuh setelah menerima vaksin bisa menyebabkan kematian (Ridlo, 2019). Narasi lainnya mengatakan bahwa metode vaksinasi COVID-19 yang berbasis mRNA seperti pada vaksin Sinovac bisa memicu mutasi sel dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan Kanker bahkan mengubah DNA manusia (Rahayu, 2021).

Penjelasan-penjelasan yang seolah ilmiah tapi keliru semacam ini rupanya sudah sering terdengar di masyarakat ketika menyikapi suatu persoalan yang mereka hadapi. Fenomena ini muncul bukan tanpa

alasan. Selain karena 'hoaks kesehatan' memang sudah sering dijadikan propaganda oleh sebagian orang untuk meraup keuntungan ekonomi, rendahnya minat baca pada masyarakat Indonesia membuat mereka cenderung menyukai kesimpulan yang sederhana dan mengejutkan (Ridlo, 2019; Saputra, Sulistyarini, & Imran, 2015). Akibatnya, pemahaman yang didapatkan menjadi tidak utuh bahkan sesat. Alih-alih memperoleh penjelasan ilmiah yang valid, masyarakat menjadi rentan terhadap narasi *pseudo-sains* yang berbahaya. Pada beberapa hoaks bahkan narasinya tampak sekali sebagai cerita fiktif. Misalnya, sebuah hoaks yang memperlihatkan seseorang menempelkan koin di area bekas suntikan vaksin COVID-19 dan mengatakan bahwa vaksin mengandung unsur logam magnetis atau yang menyebutkan bahwa nama Astrazenecca dalam vaksin COVID-19 memiliki arti senjata mematikan (Nuralam, 2021).

Berikutnya, isu yang juga diakomodasi dalam narasi hoaks vaksin COVID-19 adalah mengenai agenda politik-ekonomi global. Sebagaimana disebutkan di awal, sebagian masyarakat Indonesia memiliki kekhawatiran yang berlebihan tentang agenda yang diyakini dikendalikan oleh Barat ini. Konteks perbincangan yang berkembang di kalangan mereka yaitu bahwa Barat dengan kekuatannya yang dominan memegang peranan yang sangat besar dalam berbagai kejadian yang ada di dunia saat ini. Dalam hal ini, 'Barat' dianggap merepresentasikan dua kepentingan yaitu sebagai pihak kapitalis dengan motif ekonominya, dan sebagai pihak Yahudi-Nasrani dengan misi anti-Islamnya. Narasi ini dianggap cukup beralasan mengingat Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah. Oleh karena itu, situasi apapun harus ditanggapi dengan penuh kewaspadaan, termasuk COVID-19 dan vaksinya.

Hoaks yang muncul kemudian menjelaskan tentang adanya konspirasi dan rekayasa global untuk mensukseskan program vaksin massal. Mereka percaya jika vaksin sebenarnya adalah *chip*

yang ditanamkan ke dalam tubuh seseorang untuk melacak dan mengirimkan data pribadi. Sebuah akun di Twitter bernama SeaBee misalnya, pada 9 Januari 2021 memposting sebuah gambar rangkaian elektronik yang diberi judul “Covid-19 5G Chip Design”. Informasi yang memanipulasi gambar skema sirkuit elektronik dari sebuah pedal gitar ini bisa diterima karena terjalin dengan sejumlah narasi lain yang seolah terkait dan saling menguatkan dugaan di atas. Seperti berita yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh dunia seperti Bill Gates dan CEO Pfizer tidak mau divaksin proses vaksinasi kepada presiden RI Joko Widodo sebenarnya hanyalah pemberian suntikan vitamin (kompas.com, 2021).

Bagi sebagian orang, narasi ini menguatkan keyakinan mereka bahwa vaksin COVID-19 adalah rekayasa untuk memasukkan chip Microsoft ke tubuh orang-orang yang akan diambil datanya (kompas.com, 2021). Narasi yang memberikan kesan tentang sejumlah tokoh atau pejabat yang menolak vaksin memang tidak sepenuhnya salah, tetapi mengandung informasi yang keluar dari konteksnya sehingga menjadi salah (*misleading information*) sebagaimana yang terjadi pada ketua fraksi PDIP Ribka Tjiptaning juga mengenai 17 negara yang melarang penyebaran vaksin AstraZeneca. Akibatnya, respon masyarakat menjadi penuh kecurigaan dan kepercayaan tentang adanya konspirasi jahat di balik vaksin. Belum lagi ditambah hoaks yang di dalam narasinya seolah sedang membongkar proses kegiatan syuting propaganda untuk memperlihatkan dampak kematian fatal dari COVID-19 agar masyarakat mau menerima vaksin. Jika dicermati, antar narasi hoaks di atas tampak saling mendukung satu sama lain seperti *puzzle*. Sehingga, sebagian warganet mungkin akan merasa puas ketika bisa membuat kesimpulan dengan menghubungkan masing-masing narasi itu. Kenyataannya, alih-alih ia menemukan penjelasan yang valid, mereka justru masuk dalam jebakan skenario hoaks tersebut.

Pada akhirnya, sebagian temuan mengenai tren hoaks vaksin COVID-19 yang sudah disebutkan di atas menjelaskan bahwa informasi hoaks tidak tumbuh dan berkembang dalam ruang yang terpisah dari konteks sosial masyarakatnya. Bahkan, sebagai produk informasi ia diproduksi sebagai respon atas dinamika yang terjadi di masyarakat. Sehingga, proses yang terjadi antara informasi dan warganet di media digital sebenarnya adalah proses interaksi resiprokal yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Secara garis besar, konteks hoaks vaksin COVID-19 yang tumbuh berkembang dan beredar di kalangan warganet Indonesia di atas adalah cerminan dari dinamika dan struktur sosial yang ada seperti keberadaan sentimen berbau SARA, polarisasi warga akibat politik *buzzer*, keterikatan warga pada otoritas keagamaan, rendahnya budaya literasi, hingga kebijakan penanganan pandemi yang tidak sensitif dan responsif terhadap situasi actual (Hasyim, 2020).

Dampak Keterpaparan Hoaks Vaksin COVID-19

Fenomena hoaks bukan sekedar fenomena digital yang menerangkan aktivitas dunia-maya, tetapi juga fenomena sosial yang menunjukkan realitas empiris di masyarakat pada aspek-aspek tertentu. Dalam tulisan ini, konteks yang paling relevan untuk menunjukkan hal tersebut adalah dengan melihat bagaimana respon masyarakat ketika menyikapi pandemi COVID-19, termasuk persepsi mereka terhadap vaksin. Sebagaimana diungkapkan oleh Ilham Akhsanu Ridlo (Ridlo, 2019) bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin tergolong rendah bahkan menurun. Hal ini diantaranya disebabkan oleh pengaruh berita palsu dan teori konspirasi tentang vaksin. Keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 menjadi salah satu penghambat program vaksinasi. Hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan ITAGI, UNICEF, dan WHO menemukan bahwa hanya 65% responden yang menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan

Pemerintah. Sisanya menyatakan ragu bahkan menolak disebabkan sejumlah alasan terutama karena tingkat kepercayaan yang berbeda pada vaksin dan kredibilitas Pemerintah.

Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika beberapa media melaporkan kasus penolakan vaksin COVID-19 di sejumlah tempat, seperti seorang guru swasta di Kota Tangerang, Banten yang dengan tegas mengatakan "*Kalau sekolah saya mengadakan vaksinasi COVID-19, saya lebih baik mengundurkan diri!*" (S. M. Bere, 2021). Kasus yang lebih massif terjadi pada sejumlah warga di Kabupaten Alor, NTT yang bersembunyi di hutan karena takut disuntik vaksin COVID-19, juga warga di Sumatera Barat yang enggan divaksin COVID-19 karena percaya hoaks (Iswinarno, C. & Sari, 2021). Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh CNN Indonesia, sejumlah pedagang pasar di DKI Jakarta menyatakan tidak bersedia menerima vaksin. Selain percaya pada sejumlah informasi hoaks sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mereka juga kurang percaya dengan langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah selama ini yang dinilai tidak sensitif dengan persoalan masyarakat.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bagaimana pengaruh hoaks vaksin COVID-19 yang beredar di media sosial serta keterpaparan hoaks menyasar warganet dari beragam latarbelakang dan tingkat pendidikan. Tidak hanya itu saja, sejumlah tokoh publik yang dikenal cukup berpendidikan serta artis juga tercatat terpapar hoaks vaksin COVID-19. Bahkan, pada orang-orang tersebut efek potensi penyebarannya menjadi lebih besar karena mereka dijadikan sebagai panutan oleh banyak masyarakat. Sebut saja Jerinx SID, Ichsanuddin Noorsy, hingga Ustadz Ihsan Tanjung. Para figur masyarakat itu bahkan terang-terangan menghimbau masyarakat untuk tidak percaya dan tidak menerima vaksin COVID-19.

Bukti-bukti empiris mengenai keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 pada masyarakat ini menjelaskan kerentanan masyarakat terhadap informasi hoaks karena didukung oleh rendahnya tingkat

literasi digital. Poin ini menegaskan bahwa informasi hoaks di dunia digital adalah produk dari konteks sosial, kebudayaan, dan politik masyarakatnya. Sejumlah ahli menggarisbawahi rendahnya minat baca masyarakat, pandangan yang fatalistik dari otoritas agama, serta sikap *denial* dan cenderung meremehkan dari otoritas Pemerintah sebagai faktor yang menyuburkan hoaks dan menghambat penanganan pandemi COVID-19 (Hasyim, 2020; Loomba, 2021; Singh et al., 2021).

Namun, sekilas poin-poin kesimpulan ini akan tampak tidak sinkron jika mengacu pada hasil survei yang menyatakan bahwa kerentanan terpapar hoaks berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan dan ekonomi suatu masyarakat (Lewandowsky, S., 2021). Sementara, tokoh-tokoh yang terpapar hoaks vaksin sebagaimana disebutkan di atas tidak termasuk kelompok warga miskin ataupun berpendidikan rendah. Maka dari itu, tulisan ini melihat fenomena keterpaparan informasi hoaks vaksin COVID-19 sebagai proses pengambilan keputusan yang bersifat individual. Pembacaan ini tidak dimaksudkan untuk mengacuhkan faktor lingkungan eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang. Tetapi, untuk melihat sikap yang diperlihatkan oleh seseorang sebagai sebuah keputusan yang dihasilkan oleh proses internal yang melibatkan nalar pengetahuan dan emosi pribadi dalam kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, keterpaparan hoaks merupakan proses yang bersifat unik yang tidak bisa dipukul rata ke setiap individu anggota komunitas tertentu.

Keterpaparan Hoaks Sebagai Hasil Proses Kognitif

Sudah lebih dari satu tahun masyarakat Indonesia berjibaku dengan wabah COVID-19. Data yang melaporkan situasi di lapangan mulai dari jumlah kasus kematian hingga tingkat kesembuhan terkait virus SARS-CoV-2 terus diperbarui oleh media resmi pemerintah dan komunitas pegiat literasi COVID-19. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih menyangkalnya, mulai dari kalangan terdidik hingga

warga umum yang sudah pernah terinfeksi (Arif, 2021). Akibatnya, banyak di antara mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan, termasuk rendahnya tingkat partisipasi dalam program vaksinasi COVID-19. Sejumlah kasus keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 yang sudah disebutkan di atas mengkonfirmasi fenomena tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya pada hoaks vaksin COVID-19 memiliki nalar berpikirnya sendiri yang tidak bisa berubah begitu saja dengan melihat situasi di lapangan yang menunjukkan bukti-bukti mengenai bahaya COVID-19 dan manfaat vaksin. Kelompok yang oleh sebagian pakar disebut sebagai *splinter* itu pada umumnya memang 'menyukai' penjelasan *non-mainstream* yang mengkaitkan potongan-potongan informasi untuk mendukung hal-hal yang sudah mereka yakini sebelumnya. Fenomena semacam ini dijelaskan oleh Herbert A. Simon (H.A Simon, 2000) sebagai bentuk rasionalitas terbatas, yaitu ketika pilihan sikap dan tindakan seseorang sebenarnya tidak benar-benar diambil atas dasar rasionalitas yang optimal, tetapi untuk memenuhi ekspektasi kepuasan kognitif. Secara praktis, keputusan yang diambil oleh seseorang tidak semata-mata dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, tetapi merupakan hasil dari proses internal-berpikir dalam dirinya.

Pola berpikir ini misalnya tampak pada opini yang dinyatakan oleh Ichsanuddin Noorsy terkait pandemi dan vaksin COVID-19. Dalam wawancara TV One (15/8/2020) Noorsy mengatakan bahwa vaksin COVID-19 merupakan alat atau *chip* yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk melakukan sinkronisasi data tentang kondisi seseorang. Meskipun informasi ini sudah diidentifikasi sebagai hoaks oleh berbagai media mainstream, hal itu tidak mematahkan kepercayaan yang dipegang oleh Noorsy. Koreksi informasi dari sejumlah pihak justru semakin meyakinkan dirinya bahwa temuannya membahayakan kepentingan pihak tertentu, dan oleh karena itu banyak pihak yang berusaha menggugurkan argumentasinya. Pada saat yang sama, ia

semakin merasa berdiri di titik tepat untuk membela kebenaran dalam versinya.

Keyakinan Noorsy ini sebenarnya bisa ditarik benang merahnya ke sejumlah pernyataannya terdahulu. Dalam berbagai kesempatan, ia meyakini ada persaingan bisnis yang besar dibalik berbagai produk dan informasi kesehatan. Bahkan, ia menyebut WHO (*world health organization*) sebagai lembaga yang disetir kepentingan industri yang bergerak di bidang kesehatan pada level internasional. Oleh karena itu, ia menganggap segala hal yang terkait dengan WHO tidak terlepas dari kepentingan bisnis juga. Pada kasus vaksin COVID-19, ia menganggap ada pihak tertentu yang berkepentingan dengan data dan informasi rinci tentang kondisi seseorang. Salah satu cara untuk mendapatkan data itu adalah dengan memasukkan *chip* ke dalam tubuh. Lalu, *chip* tersebut akan mengirimkan data ke *server* atau pusat data untuk kepentingan riset perusahaan komersial. Ia merujuk ke sejumlah sumber yang menyebutkan bahwa data mengenai seseorang adalah *digital currency* yang bernilai tinggi di dunia saat ini sebagaimana yang terjadi lewat akun-akun media sosial pada *smartphone*. Belum lagi, dengan mencontohkan data pemerintah tentang kasus pasien dan korban meninggal akibat COVID-19 yang tidak sinkron di berbagai daerah, ia menyebut bahwa data penanganan COVID-19 di Indonesia tidak transparan dan kredibel. Lebih jauh, ia mengkaitkan inkonsistensi pemerintah dalam menangani wabah ini dengan kelonggaran yang diberikan kepada para pekerja warga negara China yang masuk ke Indonesia di masa pandemi. Sejumlah temuan tersebut menguatkan pendapatnya bahwa pandemi dan vaksin COVID-19 sebenarnya adalah bisnis untuk tujuan keuntungan politik dan ekonomi.

Narasi semacam ini menjadi sangat masuk akal bagi Noorsy, mengingat latarbelakangnya sebagai seorang ekonom. Bagi dirinya, segala peristiwa yang terjadi di dunia cenderung dilihat sebagai aktivitas ekonomi untuk mendapatkan untung-rugi, menguasai atau dikuasai pasar. Logika matematika kuantitatif semacam ini tampaknya

membuat Noorsy cenderung mengabaikan kompleksitas situasi yang terjadi selama pandemi COVID-19. Cara pandang yang bias orientasi ekonomi menjadikan orang seperti Noorsy terlalu fokus mencurigai potensi-potensi keuntungan yang bisa diraih pihak tertentu dari produk-produk kesehatan terkait wabah COVID-19 termasuk vaksin. Noorsy juga menyatakan sanksi atas kematian yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Ia menyangkalnya dengan membandingkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit lain seperti malaria dan demam berdarah yang diklaimnya lebih tinggi dari COVID-19. Tetapi, lanjutnya, penerapan protokol COVID-19 memaksa semua kematian diklaim sebagai COVID-19, dan inilah yang menyebabkan angka kematian akibat wabah SARS-CoV-2 menjadi tinggi. Meskipun Noorsy sendiri tidak terang-terangan menolak keberadaan virus SARS-CoV-2 yang berbahaya, tetapi ia menolak langkah-langkah penanganan massif yang dilakukan di berbagai negara untuk menangani wabah ini. Ia meyakini tindakan-tindakan tersebut berpotensi digunakan sebagai strategi untuk menundukkan masyarakat global lewat data dan informasi pribadi. Akibatnya, ia secara terang-terangan menolak penggunaan penerapan protokol kesehatan dan penyuntikan vaksin COVID-19.

Dalam kerangka rasionalitas terbatas, keputusan yang diambil oleh seseorang dimulai dari wawasan heuristik, yaitu pengalaman masa lalu, ingatan pengetahuan, suasana psikis, nilai ideologis, dan ekspektasi yang mendorong seseorang untuk menentukan pilihan sikap. Pada kasus Noorsy, selain latarbelakang minatnya pada isu ekonomi, proses ini bisa dilihat dalam aktivitas dan keterlibatannya di dalam “kelompok Islam” yang sering berseberangan secara ideology dan politik dengan rezim Pemerintah Pusat saat ini. Sikap rezim pemerintah yang cenderung represif kepada sejumlah orang dari lingkaran kelompok ini membuat ia tidak bisa sepenuhnya percaya pada kebijakan negara. Apalagi, dalam beberapa kasus pemerintah dianggap diskriminatif dalam menegakkan aturan seperti pada kasus pelanggaran protokol kesehatan yang disangkakan kepada M. Rizieq Shihab.

Sikap kecewa pada pemerintah semakin menguat manakala banyak pejabat resmi dianggap tidak menampakkan *sense of crisis* dalam bahasa komunikasi publik mereka. Perilaku pejabat semacam ini memunculkan kecurigaan jika bahaya COVID-19 terlalu dibesarkan untuk menakut-nakuti masyarakat awam saja. Apalagi, sejumlah kasus korupsi yang menyasar dana penanganan COVID-19 di berbagai sektor turut menguatkan narasi adanya 'proyekisasi' situasi pandemi oleh segelintir elit pemerintah dan pengusaha. Dalam kondisi sosial politik dan psikis seperti ini, di mana landasan heuristik sudah terbentuk dalam alam berfikir seseorang, maka informasi yang bisa diterima akal hanyalah yang sesuai dengan preferensi subjektifnya. Roozenbek dalam tulisannya menegaskan keterkaitan yang kuat antara proses kognitif semacam itu dengan kerentanan seseorang terhadap misinformasi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika narasi hoaks vaksin COVID-19 memiliki karakter yang identik dengan hoaks lain yang sudah sering beredar di media sosial Indonesia. Sebab, dalam kasus infodemi ini, produksi narasi hoaks tampaknya memang disesuaikan dengan 'minat' masyarakat tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang pembuat konten hoaks, menghadirkan informasi dengan narasi yang mendukung preferensi seseorang dapat menghasilkan efek 'titik kritis' di mana ia cenderung tidak kritis dan menerima isi informasi tersebut. Kondisi ini merupakan gejala psikologis umum, sebagaimana yang sering terjadi dalam penipuan dengan modus transfer, ketika 'korban' tidak diberi kesempatan untuk mengolah informasi dan membuat analisis secara mendalam.

Cara penalaran serupa sebenarnya juga terjadi pada orang-orang dengan latarbelakang yang berbeda ketika mereka mengalami keterpaparan hoaks vaksin COVID-19. Pada kasus Ustad Ihsan Tanjung, landasan heuristik itu adalah narasi-narasi yang diyakininya tentang tanda-tanda kiamat dan muslihat Barat sebagai representasi Yahudi-Nasrani dan China sebagai representasi komunis yang dianggap

sebagai musuh umat Islam. Kedekatan rezim pemerintah Indonesia dengan China yang terwujud dalam berbagai bentuk kerjasama ekonomi menjadi alasan bagi Ihsan Tanjung untuk meragukan langkah kebijakan pemerintah, termasuk dalam penanganan wabah COVID-19. Baginya, kebijakan pembatasan sosial yang memaksa masjid-masjid untuk tidak melaksanakan shalat secara berjamaah, memakai masker yang menghalangi seseorang untuk tersenyum, melarang orang berangkat Umroh dan Haji, semua itu adalah kejahatan yang luar biasa yang ditujukan kepada umat Islam. Bagi Ihsan Tanjung, tidak mungkin terjadi perdamaian antara kelompok Islam dan kelompok Kafir dalam bidang apapun. Maka, tidak masuk akal baginya jika ada seorang muslim menerima produk yang dibuat oleh pihak kafir seperti vaksin.

Sampai di sini menjadi jelas kenapa tren narasi hoaks pada umumnya mengerucut pada tiga isu besar yang sering beredar di masyarakat sebagaimana disebutkan di awal yaitu menyangkut isu SARA, isu pseudo-sains, dan isu politik. Sampai pada tahap ini, diskursus sosial menjadi konteks yang mencerminkan sekaligus mempengaruhi alam berpikir seseorang. Secara praksis, lingkungan eksternal 'hanya' memberikan latar belakang informasi sebagai bahan pertimbangan dalam suatu keputusan, tetapi bukan faktor penentu yang utama. Dalam kasus keterpaparan informasi hoaks, proses heuristik ini membuat seseorang tidak melakukan verifikasi mendalam terhadap informasi yang menggunakan narasi yang sesuai dengan topik yang diminatinya. Sebagaimana dikutip oleh Hernita Sahban, Frank Harison menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan munculnya rasionalitas terbatas yaitu informasi yang datang dari luar sangat kompetitif atau justru tidak sempurna. Apalagi, kebanyakan orang menghindari proses kognitif yang memerlukan usaha mendalam untuk melakukan klarifikasi seperti halnya mencari informasi perbandingan. Hal ini disebabkan kemampuan kognitif seseorang selalu bersifat terbatas, dan hasil dari suatu pengambilan

keputusan pada akhirnya merupakan “pilihan yang dianggap memuaskan” di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Dalam hal ini, informasi yang paling memuaskan tentu saja adalah informasi yang mendukung asumsi-asumsi yang sudah ada dalam pikiran seseorang. Atas dasar prosedur kognitif semacam inilah, Simon (H.A Simon, 2000) menyebut prosedur rasionalitas yang terjadi secara kognitif sebenarnya adalah pemuasan (*satisficing*), yaitu proses memilih dan mengorbankan alternatif-alternatif yang ada untuk meneguhkan pilihan dan sikap mula-mula. Proses ini dilakukan dengan mencari informasi-informasi yang sesuai minat, lalu diklaim sebagai proses pembuktian. Pada tahap ini, seseorang tidak bisa membedakan antara fakta dan opini.

Oleh karena itulah, pada kasus keterpaparan hoaks vaksin COVID-19, data yang disodorkan oleh media resmi tidak bisa dengan mudah merubah persepsi orang yang sudah percaya dengan hoaks. Pada kondisi ini, terjadilah apa yang disebut sebagai efek gelembung filter, yaitu di mana akun yang membuka akses pada konten media yang mengandung hoaks akan disajikan dengan hoaks lain yang lebih banyak dibandingkan dengan akun yang mengakses konten yang cenderung netral (Juneja, P., & Mitra, 2021). Juneja dan Mitra sebenarnya menjelaskan bagaimana mesin pencari (*search engine*) secara algoritmik meningkatkan resiko keterpaparan pengguna terhadap hoaks mengikuti kecenderungan perilaku penggunaannya. Sebaliknya, warganet yang terlibat dalam pencarian informasi yang terpercaya dapat membantu menavigasi informasi yang terpercaya juga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 pada warganet di Indonesia merupakan hasil keputusan pribadi yang didorong oleh kecenderungan mengakses dan mengafirmasi informasi yang

sesuai dengan minat ideologis dan pragmatismenya. Sejumlah kasus keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 pada warganet menunjukkan bahwa mereka memiliki latarbelakang sosial yang berbeda. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi warganet tidak selalu berbanding terbalik dengan risiko keterpaparan hoaks sebagaimana asumsi yang didasarkan pada survei sebaran informasi hoaks. Selain itu, fenomena keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 juga tidak bisa dijelaskan hanya dengan mengidentifikasi dan memetakan arus informasi hoaks tersebut di media digital tanpa melihat respon dan dampak yang muncul di tengah masyarakat secara nyata. Cara pandang ini menekankan salah satu poin penting dalam isu literasi digital, yaitu menempatkan warganet sebagai subyek-aktif dalam arus informasi digital.

Berdasarkan hasil temuan yang ada, penelitian ini menyimpulkan bahwa warganet yang mengalami keterpaparan hoaks vaksin COVID-19 paling tidak telah melalui tiga proses kognitif yang kompleks. *Pertama*, warganet membangun landasan heuristik lewat nilai ideologi, wawasan sosial, pengalaman masa lalu, dan suasana psikis yang membentuk asumsi-asumsi pribadi tentang vaksin COVID-19. Tahapan ini sangat menentukan ketika seseorang memutuskan untuk mengakses informasi hoaks yang memuat narasi-narasi yang dianggap sesuai dengan sejalan dengan asumsi pribadinya. Proses ini terjadi misalnya ketika warganet dengan latarbelakang agama akan cenderung tertarik dengan informasi vaksin yang memuat narasi berbau agama, begitu juga warganet yang memiliki minat pada artikulasi yang bersifat saintis akan mencari informasi vaksin yang memuat narasi sains di dalamnya. *Kedua*, warganet menemukan konteks sosial yang menguatkan asumsi pribadinya menurut cara penalarannya sendiri. Dalam konteks Indonesia, struktur sosial yang mengakomodasi sentimen kelompok berbasis isu SARA, fragmentasi sikap publik figur terkait pandemi, polarisasi politik, kekecewaan pada situasi dan kebijakan penanganan pandemi, serta komunikasi

publik para pemangku kepentingan yang tidak menunjukkan *sense of crisis* secara tidak langsung membangkitkan ketidakpercayaan masyarakat (*public distrust*) pada narasi mainstream terkait vaksin COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. *Ketiga*, warganet mengalami keterbatasan dalam mengelaborasi pengetahuan yang dimiliki dan informasi yang didapat dari luar dirinya. Dalam kasus hoaks vaksin COVID-19, yang terjadi justru warganet secara kognitif menyaring dan membatasi diri dari informasi-informasi pembanding yang kemungkinan memadai mengklarifikasi asumsi yang keliru tentang vaksin COVID-19. Hal itu dilakukan karena ketidaksiapan mental untuk menerima koreksi pada dirinya sendiri. Akibatnya, proses mental yang terjadi tidak lebih dari sekedar memuaskan diri (*satisficing*) dengan informasi dan nalar subjektif. Proses ini melahirkan fenomena yang disebut sebagai darurat berpikir kritis atau *post truth syndrome*. Oleh karena itu, tidak heran jika orang yang mempercayai hoaks vaksin COVID-19 tidak bisa segera merubah pandangannya setelah membaca klarifikasi tentang hoaks tersebut.

Saran

Konsekuensi dari temuan ini terhadap strategi melawan hoaks bagi pemangku kebijakan menyarankan perlunya memahami kenapa seseorang memutuskan untuk mempercayai informasi tersebut. Paradigma komunikasi inilah yang ditekankan oleh Stanley, dkk. (2020) dalam strategi komunikasi dan pengambilan keputusan publik. Paradigma ini berlawanan dengan strategi melawan hoaks yang terlalu fokus pada pengetatan arus informasi digital yang justru akan mengancam hak kebebasan memperoleh informasi. Alih-alih meningkatkan kemampuan literasi warganet. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat melakukan riset terkait hoaks seputar pandemi yang masih terus berkembang hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). Antara Komunikasi, Budaya dan Hoax. In A. Wahyudin & M. Sunuantari (Eds.), *Melawan Hoaks di Media Sosial dan Media Massa*. Yogyakarta: Trust Media Publishing & Askopis Press.
- Ansoriyah, F., Warella, Y., Purnaweni, H., & Hastuti, R. S. (2020). Responses to Pandemic Covid-19 by Mosque-Based Zakat Agency: Opportunities and Limitations in Zakat Management. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 5(2).
- Arif, A. (2021). Memahami Nalar Penyangkal Pandemi. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/23/memahami-nalar-penyangkal-pandemi>
- Bafadhal, O. M., & Santoso, A. D. (2020). Memetakan Pesan Hoaks Berita COVID-19 di Indonesia Lintas Kategori, Sumber, dan Jenis Disinformasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(2), 235–249.
- Bakri, S., Zulhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). MENANGGULANGI HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN ISU SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN DI TAHUN POLITIK. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2).
- Berger, P. & Luckman, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Penguin.
- Bistara, R. (2020). Polemik Agamawan dan Saintis Seputar Covid-19: Menilik Gagasan Integrasi Agama dan Sains Perspektif Mehdi Golshani. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 5(2), 263–286.
- CNN Indonesia. (2021). Sejumlah Pedagang Pasar Menolak Divaksinasi. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/tv/20210218091825-434-607715/video-sejumlah-pedagang-pasar-menolak-divaksinasi>
- covid19.go.id. (2021). Awas Hoaks: Vaksin Sinovac Memberi Efek Samping Pembesaran Alat Kelamin. Retrieved from <https://covid19.go.id/p/berita/awas-hoaks-vaksin-sinovac-memberi-efek-samping-pembesaran-alat-kelamin>

- F Alamsyah. (2021). Kasus Hoaks Vaksinasi dan Covid-19 Mencapai 2.500, Satgas: Ini Tantangan Pertama. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/corona/2021/04/10/kasus-hoaks-vaksinasi-dan-covid-19-mencapai-2500-satgas-ini-tantangan-pertama>
- H.A Simon. (2000). Bounded Rationality in Social Science: Today and Tomorrow. *Mind and Society*, 1(1), hlm. 25-39.
- Hadi, M.D.S., Widodo, P. & Putro, R. W. (n.d.). Analisis Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Keamanan Siber. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), hlm. 1-9.
- Hannan, A., Azizah, S., & Atiya, H. (2020). Dinamika Pesantren dalam Merespons Pandemi Covid-19 di Madura. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 5(2).
- Hasyim, S. (2020). Covid-19, Islamic Civil Society and State Capacity in Indonesia. *ISEAS Perspective*.
- Heryanto, G. G. (2017). Bisnis Hoaks dan Literasi Digital. Retrieved May 28, 2019, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/120440-bisnis-hoaks-dan-literasi-digital>
- Iswinarno, C. & Sari, R. R. . (2021). Ini 3 Daerah Teratas yang Warganya Menolak Vaksin Covid-19, Nomor Satu DKI. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2021/03/23/190906/ini-3-daerah-teratas-yang-warganya-menolak-vaksin-covid-19-nomor-satu-dki>
- Juditha, C. (2018). Interaksi Simbolik Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks. *Jurnal (PIKOM) Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 19(1), 17-32. <https://doi.org/10.31346/jpkp.v19i1.1401>
- Juneja, P., & Mitra, T. (2021). Auditing E-Commerce Platforms for Algorithmically Curated Vaccine Misinformation,. In *Proceedings of the 2021 chi conference on human factors in computing systems* (p. hlm. 1-27).
- kompas.com. (2021). [HOAKS] Chip Microsoft Dimasukkan ke Vaksin Covid-19 Pfizer. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/26/121000065/hoaks-chip-microsoft-dimasukkan-ke-vaksin-covid-19-pfizer?page=all>
- Lewandowsky, S., D. (2021). The COVID-19 Vaccine Communication Handbook. A Practical Guide for Improving Vaccine

Communication and Fighting Misinformation.

- Loomba, S. dkk. (2021). Measuring the Impact of COVID-19 Vaccine Misinformation on Vaccination Intent in the UK and USA. *Nature Human Behaviour*, 5(3), hlm. 337-348.
- Maqruf, R. D. (2021). BAHAYA HOAKS DAN URGENSI LITERASI MEDIA: STUDI PADA MAFINDO SOLO RAYA. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 2(1). <https://doi.org/10.22515/ajdc.v1i1.3273>
- Nuralam, C. (2021). Laporan Kominfo Soal Sebaran Hoaks Vaksin Covid-19: Jumlahnya Nyaris 700. Retrieved from <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4499286/laporan-kominfo-soal-sebaran-hoaks-vaksin-covid-19-jumlahnya-nyaris-700>
- Pramono, G. E. (2020). Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2), hlm. 304-317.
- Rahayu, K.Y., dkk. (2021). No Title.
- Rahayu, R. N. & S. (2021). Vaksin COVID-19 di Indonesia: Analisis Berita Hoax. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(7), hlm. 39-49.
- Ridlo, I. A. (2019). Hoaks anti-vaksinasi marak, bagaimana menyusun kebijakan kesehatan berbasis kebenaran ilmiah. Retrieved from <https://fkm.unair.ac.id/hoaks-anti-vaksinasi-marak-bagaimana-menyusun-kebijakan-kesehatan-berbasis-kebenaran-ilmiah/>
- S. M. Bere. (2021). Cerita Warga Satu Dusun di Alor Sembunyi di Hutan karena Takut Disuntik Vaksin Covid-19. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/02/18/09100011/cerita-warga-satu-dusun-di-alor-sembunyi-di-hutan-karena-takut-disuntik>
- Saputra, R. R., Sulistyarini, & Imran. (2015). Peran Orang Tua Sebagai Agen Sosialisasi Pendidikan Dasar Anak Keluarga Pemulung Di Pontianak. *Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(10), 1-10.
- Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis.

- Singh, K., Lima, G., Cha, M., Cha, C., Kulshrestha, J., Ahn, Y.-Y., & Varol, O. (2021). Misinformation, Believability, and Vaccine Acceptance Over 40 Countries: Takeaways from the Initial Phase of the COVID-19 Infodemic. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2104.10864>
- Susilo, D., Putranto, T.D., & Navarro, C. J. S. (2021). Performance of Indonesian Ministry of Health in Overcoming Hoax About Vaccination Amid the COVID-19 Pandemic on Social Media. *Nyimak Journal of Communication*, 5(1), hlm. 151-166.
- Tsaniyah, N., & Juliana, K. A. (2019). Literasi Digital sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Era Disrupsi. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1).
- Zuhri, A. (2020). Instagram, Pandemi dan Peran Influencer (Analisis Wacana Kritis pada Postingan Akun Instagram @najwashihab dan @jrksid). *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 1(2). <https://doi.org/0.22515/ajdc.v1i2.2722>

